

Aksi Teror dan Kehadiran Negara

Oleh: Gatut Priowidodo, Ph.D

Minggu pagi itu (13/5/2018), tangan terasa gemetar dan mulut tercekak. Baru saja ibadah Minggu pagi usai, tersiar kabar beberapa gereja di Surabaya diledakkan bom bunuh diri. Disebutkan ada tiga puluh gereja, ada yang menyebut lima dan terakhir yang terkonfirmasi tiga gereja yakni GPPS Jalan Arjuno, GKI Jalan Diponegoro dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel. Korban tewas 14 dan 42 luka-luka. Diantara mereka ada juga mahasiswa dan anak-anak. Sadis dan sangat biadab.

Surabaya yang selama ini relatif tak pernah dekat dengan aksi teror bom, nyatanya terimbas pula. Ledakan berlangsung di tiga titik yang hampir serentak waktunya. Polri menyebut ini dilakukan oleh satu keluarga alumni relawan Syiria, yakni pasangan Dita Oepiarto-Puji Kuswati beserta empat anaknya Yusuf Fadhil, Firman Halim, Fadila Sari dan Famela Rtizqita adalah keluarga anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD)-Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Dengan tugas masing-masing mereka bertindak sebagai pengantin atau eksekutor lapangan.

Hadirnya Negara

Masih terngiang Nawacita Jokowi-JK kesatu, menghadirkan kembali negara untuk melind-

ungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Lalu dimana ia hadir, bila beribadah di rumah ibadahnya sendiri sudah tidak aman? Jika ada sekelompok garis keras yang tidak mentolerir keragaman, di mana negara harus hadir memaksa mereka mau menghargai perbedaan. Seperti ditegaskan poin kesembilan Nawacita yakni memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Jujur, Indonesia masih belum tuntas dengan urusan keragaman religiusitas. Ketimpangan sosial, kesulitan ekonomi, kesenjangan kaya-miskin kerap kali dijadikan jalan pintas instrumen legitimasi menteror umat lain dengan cara-cara biadab. Simbol keagamaan seolah sangat seksi untuk dijadikan sasaran kemarahan yang bisa mengaduk-aduk emosi publik.

Target empuk yang mudah ditembak adalah gereja yang mereka anggap simbol kekafiran. Berulang-kali, Polri sebagai pemegang otoritas kendali keamanan negara gagal mengantisipasi. Pada malam Natal (25/12/2000) misalnya, lokasi di Jakarta dan sekitarnya yang notabene ibu kota negara Indonesia, beberapa gereja diledakkan seperti Gereja Katedral di Jalan Lapangan



Banteng dan Gereja Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara dari kawasan Jakarta Timur, Gereja Santo Yoseph, Matraman, Gereja Koinonia, Jatinegara, dan Gereja Persekutuan Oikumene, Halim juga diledakkan. Ratusan orang tewas.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya Minggu (13/11/2016) bom molotov meledak di depan gereja Oikumene di Jl Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lo Janan Ilir, Samarinda, Kaltim. Menyusul esoknya Senin, 14 November 2016, sekitar pukul 08.30, teror bom menimpa Gereja Katolik Paroki Gembala Baik di Jalan Ridwan Nomor 16 Kota Batu Jawa Timur.

Pada 11 Februari 2018, teror di gereja St Lidwina di Sleman, Yogyakarta, dimana pelaku bersenjatakan pedang berupaya melakukan pembunuhan terhadap pastur yang bertugas. Belum juga reda, pertengahan Mei (13/05/2018), umat Kristiani di Surabaya digoncang ledakan bom yang sangat menyayat rasa kemanusiaan.

Tidak hanya pada level domestik, di beberapa negara Islam seperti Mesir dan Pakistan, gereja juga jadi target ledakan bom. Di katedral Cairo Coptic, Mesir, Minggu, 11 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat. Sebanyak 25 orang meninggal akibat ledakan. Enam orang di antaranya merupakan anak-anak. Sementara itu tercatat sebanyak 49 orang terluka. Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi menetapkan waktu berkabung selama tiga hari.

Demikian juga yang terjadi di kota Quetta, Pakistan, Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim serangan di gereja Metodis, pada Minggu (17/12/2017) dilakukan oleh anggotanya. Serangan pada Minggu pagi itu menewaskan sedikitnya 8 orang dan membuat puluhan orang mengalami luka.

Sekali lagi, aksi sporadis mereka intinya sedang mengirim pesan kekecewaan atas model pemerintahan yang tidak berbasis ideologi politik yang mereka yakini lebih

benar. Secara kuantitatif mereka kecil, tapi perjuangan kelompok radikal ini sangat militan. Ideologi politik di luar mereka salah. Sebab itu sah hukumnya untuk diperangi sekalipun dengan kekerasan. Mereka merasa benar karena berjihad di jalan Allah versinya.

Jika dihitung waktu, pemerintah kita sangat terlambat. Upaya apa pun mesti ditempuh agar generasi yang masih mencintai NKRI dengan semangat toleransi tetap ada. Maka, tidak ada pilihan lain agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dituntaskan. Pertengkaran definisi terorisme antara legislatif-eksekutif sebagai entri poin ke segala lini pencegahan dan penindakan harus lekas ada titik temunya. Sekedar diingat ada 1100-an WNI yang pergi ke Syiria, 500 dideportasi dan 500 masih di sana. Mereka tidak bisa diapa-apakan oleh Polri, sebelum melakukan aksi dan ada bukti. Hanya berbasiskan kekuatan UU lah, aparat bisa bertindak lebih preventif, tegas dan tidak dipersalahkan melanggar hukum dan HAM.

***Gatut Priowidodo, Ph.D** Kepala Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.